

ABSTRAK

Pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Namun, di Provinsi Aceh masih terdapat berbagai persoalan, seperti ketimpangan akses layanan, keterbatasan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta belum meratanya fasilitas pelayanan dasar. Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki peran sebagai lembaga representasi daerah yang bertugas menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPD RI dalam memajukan layanan publik bidang kesehatan dan pendidikan di Aceh serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas anggota dan sekretariat DPD RI Perwakilan Aceh, Pemerintah Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, akademisi, dan masyarakat pengguna layanan pendidikan serta kesehatan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori peran Biddle (1986) untuk menganalisis peran DPD RI serta teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980) untuk menganalisis faktor-faktor penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI telah menjalankan perannya melalui penyerapan aspirasi masyarakat, pelaksanaan fungsi pengawasan, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta penyampaian rekomendasi kepada pemerintah pusat. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena belum memberikan dampak yang signifikan dalam memajukan layanan publik bidang kesehatan dan pendidikan di Aceh. Hal ini terlihat dari masih adanya ketimpangan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, belum meratanya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta belum maksimalnya tindak lanjut aspirasi masyarakat. Faktor penghambatnya meliputi keterbatasan kewenangan DPD RI, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, tindak lanjut aspirasi yang belum maksimal, serta kondisi geografis dan kebutuhan daerah Aceh yang beragam. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar DPD RI memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan instansi

terkait dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, perlu penguatan mekanisme tindak lanjut rekomendasi agar fungsi representasi daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi yang lebih nyata dalam memajukan layanan publik bidang kesehatan dan pendidikan di Aceh.

Kata Kunci: Peran, DPD RI, Pelayanan, Publik, Pendidikan, Kesehatan, Aceh.